

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertahanan negara Indonesia atau pertahanan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan oleh pemerintah melalui sistem pertahanan negara. Pertahanan Nasional adalah gabungan kekuatan antara sipil dan militer yang diupayakan oleh negara untuk melindungi integritas wilayah Indonesia. Usaha pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer adalah menegakkan keadulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Setiap anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia berpangkat tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan menjauhi perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga negara yang baik anggota militer harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa. Akan tetapi yang terjadi di dalam faktanya bahwa ada juga anggota militer yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas dijadikan panutan, seperti tindakan anggota militer yang telah melakukan tindak kekerasan.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya perkosaan Pasal 285, penganiayaan Pasal 351,

pencurian dengan kekerasan Pasal 365, dan seterusnya.¹ Tindak Pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal demikian kerap terjadi pada mereka yang dianggap lemah seperti perempuan, anak-anak, lanjut usia, tidak berpendidikan, dan sebagainya, serta sering terjadi dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan bermasyarakat.

Penelitian hukum ini penulis akan membahas khusus kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia. Tindak kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga merupakan masalah sosial yang serius dan menyita perhatian masyarakat, sebab seharusnya keluarga merupakan lingkungan paling aman dan menjadi tempat berlindung antar anggota keluarga, namun pada kenyataan keluarga juga dapat mengancam hidup seseorang. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga di dalam rumah tangga, bentuk tindak kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik dan/atau kekerasan verbal (ancaman kekerasan).

Dewasa ini kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, tetapi tidak sedikit pula yang terjadi di kalangan anggota militer. Kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dilakukan oleh aparat militer berdasarkan data di Pengadilan

¹ Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2012 sampai Juni 2016 berjumlah 27 perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota militer. Berdasarkan data tersebut, semakin tampak bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berkembang dengan pesat di dalam ruang lingkup masyarakat biasa dan pihak penegak hukum itu sendiri seperti anggota militer.

Berdasarkan segi hukum, anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil, tetapi karena adanya beban kewajiban anggota militer maka diperlakukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri.² Dibentuknya lembaga peradilan militer adalah untuk menindak para anggota militer yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota militer dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina anggota militer yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas anggota militer sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara. Bertolak dari kerangka berpikir di atas, maka penulis mengangkat tema “Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dalam penulisan hukum ini.

² Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan I, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 14.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah apakah bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana militer). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana militer, tentang bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

a. Anggota Militer atau Tentara Nasional Indonesia

Sebagai penegak hukum yang mengemban kewajiban dan tugas besar, agar menyadari dan tetap memegang teguh jiwa keprajuritan

yang professional, patriot dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat Indonesia.

b. Masyarakat

Memberikan pemahaman ataupun penjelasan kepada masyarakat khususnya mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Penulis

Sebagai wawasan dan pengetahuan tentang pertanggung jawaban bagi anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” bukan merupakan plagiasi dari hasil skripsi lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada, yaitu:

1. Nola Fitria Sei, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2010) menulis skripsi dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif serta bagaimana persamaan dan perbedaan

kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif? Tujuan penelitian Penulis adalah untuk mendeskripsikan kekerasan terhadap istri dalam suatu rumah tangga yang dapat dijadikan alasan oleh seorang istri untuk mengajukan perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif serta untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan KDRT sebagai alasan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diambil kesimpulan yaitu hukum Islam dan hukum positif memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku tercela dan terlarang. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi adalah perbuatan terlarang dan secara esensial dapat dijadikan sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian. Hukum Islam menyinggung secara tegas mengenai kekerasan fisik sebagai alasan perceraian, sebagaimana hukum positif. Islam menyinggung secara tegas mengenai kekerasan psikis sebagai alasan perceraian, namun hukum positif tidak menyinggung secara eksplisit. Dalam hal kekerasan seksual, hukum Islam dan hukum positif tidak menyinggung secara eksplisit mengenai kekerasan seksual sebagai alasan perceraian. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama membolehkan seorang istri menuntut perceraian apabila seorang istri ditelantarkan secara ekonomi. Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis adalah Nola Fitria Sei menulis tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri

Menuntut Perceraian ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan penulisan hukum ini menulis tentang Pihak Yang Mempunyai Tanggung Jawab Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami.

2. Adam Prastisto Jati, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2014) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta”. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika dan Kendala apa saja yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika dan ada atau tidaknya kendala terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Proses penegakan hukum terhadap anggota yang militer yang diduga menggunakan narkotika harus dilakukan penyelidikan oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM) melalui intel polisi militer kemudian dilakukan pencarian bukti sehingga dapat dilakukan persidangan dan penjatuhan saksi dan Kendala yang sering dialami oleh pengadilan militer dalam melakukan penegakan hukum

terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba adalah kurangnya alat bukti serta dakwaan yang kadang tidak sesuai dengan alat bukti yang ada.

3. Fatmawati Fharuddin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Tahun 2014) dengan judul “Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara *In-Absensia*”. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara In Absensia di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada Putusan Nomor: 115-K/PM.III-16/AD/IX/2013? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara In Absensia di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa Kesatuan Yonkav 10/Serbu menerima laporan dari Dayonkav 10/Serbu tentang terdakwa Hendrik Irawan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah. Kesatuan Yonkav 10/Serbu telah melakukan upaya sesuai dengan proses hukum yang berlaku namun terdakwa tidak berhasil diketemukan, kasus tersebut dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer untuk melakukan pemeriksaan berupa penyidikan dalam mencari dan menemukan alat bukti. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan berkas tersebut ke Oditur Militer untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Oleh karena ini merupakan tindak pidana maka perkara tersebut dilimpahkan melalui Surat Keputusan Pelimpahan Perkara (Skeppera) dari Panglima Kodam VII/Wirabuana selaku Perwira Penyerah Perkara

(Papera). Setelah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan dibacakan di depan Pengadilan yang terbuka untuk umum, maka pengadilan membuat pengumuman tentang putusan tersebut dan pembuatan akta putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka Oditur Militer III-16 Makassar menyampaikan petikan putusan atas nama terdakwa kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankumnya).

Ketiga penelitian skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian penulis dimaksud untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep yang dipergunakan adalah

1. Anggota Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947), adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut. Angkatan Perang yang dimaksud di dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:
 - a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).

- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
 - c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
 - d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
2. Tindak Pidana dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Menurut seorang ahli hukum, Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.³
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

³Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan keadaan Sekarang.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan Tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan secara terpimpin dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber, guna mendukung penelitian yang diteliti oleh penulis. Narasumber yang dimaksud adalah Mayor Chk Mohamad Khazim, S.H selaku Hakim dan Budi Supriyo selaku Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Jenis penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder, apakah ada perbedaan atau persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir dilakukan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, meliputi pengertian militer, peradilan militer, susunan peradilan militer, tindak pidana, hukum disiplin militer, dan pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Selain itu bab ini juga membahas

tinjauan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi pengertian kekerasan, pengertian rumah tangga, dan pengertian kekerasan dalam rumah tangga serta menguraikan tinjauan tentang bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi beberapa saran dari penulis berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.